

Nomor : 14978/D/1/79 .

A S L I

Jakarta, 30 Maret 1979 .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA :**
- Surat Pimpinan Muhammadiyah Bagian Pendidikan dan Pengajaran Cabang Pangandaran di Pangandaran (Ciamis) tgl. 26-7-1978 No. E-5/12/PMC/1978 beserta lampiran-lampirannya ;
 - surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung tgl. 1-8-1978 No. 11-5/C.8/VIII/78 ;
 - surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung tgl. 21-9-1978 No. 2079/I.02.1/B.78 ;
 - surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal POM di Jakarta tgl. 5-10-1978 No. 580/C.3/B/78 ;
 - surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 23-12-1978 No. 0322/C.1.2.3/B.1978 ;
 - persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tgl. 29-3-1979 atas surat tgl. 28 - 3 - 1979 No. 786/Nota/D/1/79 ;

MENIMBANG : Bahwa SMP "Muhammadiyah" di Pangandaran yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Bagian Pendidikan dan Pengajaran Cabang Pangandaran di Pangandaran telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 PP No. 32 tahun 1958, sehingga perlu menetapkan status sekolah tersebut menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi terhitung mulai tanggal 1 Januari 1979 ;

- MENGINGAT :**
- PP No. 32 thn 1958 (L.N. tahun 1958 No. 52) tentang pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir ;
 - PP No. 13 tahun 1978 tentang pengangkatan Pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil .
 - Surat Keputusan Menteri P.P dan K tgl. 31-12-1960 No. 108466/U.U tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Sokongan kepada Sekolah Nasional Swasta ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 10-5-1978 No. 0171/K/1978 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa SMP "Muhammadiyah" di Pangandaran yang diselenggarakan oleh Pimpinan Muhammadiyah Bagian Pendidikan dan Pengajaran Cabang Pangandaran terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 1979

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi berdasarkan P.P No. 32 tahun 1958, dengan ketentuan bahwa :

- selama sekolah tersebut tidak dicantumkan dalam DIK Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat subsidi biaya penyelenggaraan sekolah, maka Badan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian subsidi biaya penyelenggaraan bagi sekolah tersebut ;
- selama anggaran belanja pegawai belum mengizinkan untuk pengangkatan baru guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah swasta, maka Badan yang bersangkutan tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru Negeri yang diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah tersebut diatas .
- segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

EMBUSAN : disampaikan kepada :

- Badan Pemeriksa Keuangan di Jkt.
- Dep. Keuangan di Jakarta .
- Dit.Jen.Angg.Dep.Keuangan di Jkt.
- Direkt.Pemb.Angg.Rutin Dit.Jen. Anggaran di Jakarta .
- Dit.Jen.Pengawasan Keu.Neg.di Jkt.
- Direkt.Perbendaharaan Dit.Jen. Anggaran di Jakarta .
- Kantor Perbendaharaan Negara di Bandung.
- Sek. Jen. Dep. P dan K di Jakarta .
- Inspekt.Jen.Dep. P dan K di Jakarta .
- Direkt.Jen. PDM di Jakarta .
- Direkt. PMU di Jakarta ;
- Sub. Direkt. Pembinaan SMP
- Direkt. PMU di Jakarta ;
- Kanwil Dep. P dan K Prop.Jawa Barat di Bandung .



Sesuai dengan isi surat keputusan terdapat;
A.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
S. SOESOMOARDHONO
IP. 130001532.

14. Bidang PM Kanwil Dep.P dan K Prop. Jawa Barat di Bandung ;
15. Kep.SMP "Muhammadiyah" Bersubsidi di Pangandaran (Ciamis) .
16. Biro Organisasi Dep.P dan K di Jakarta.
17. Biro Tata Usaha Dep. P dan K di Jakarta .
18. Bag.Keuangan Dit. Jen. PDM di Jakarta .
19. Bag.kepeg.Dit.Jen. PDM di Jakarta .
20. Bagian Penyusunan Anggaran Rutin Biro Keuangan di Jakarta ;
21. A r s i p .-

KUTIPAN : Disampaikan kepada Pimpinan Muhammadiyah Bagian Pendidikan dan Pengajaran Cabang Pangandaran di Pangandaran (Ciamis) untuk diketahui dan dilaksanakan .-

INSPEKSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAERAH DJAWA BARAT
DJL. RIAU 91 - TEL. 4765
BANDUNG
-000-

Bandung, 24 Djuli 1956..

Kepada Jth.
Sdr. Kepala SMP Partikular
di DJAWA BARAT -

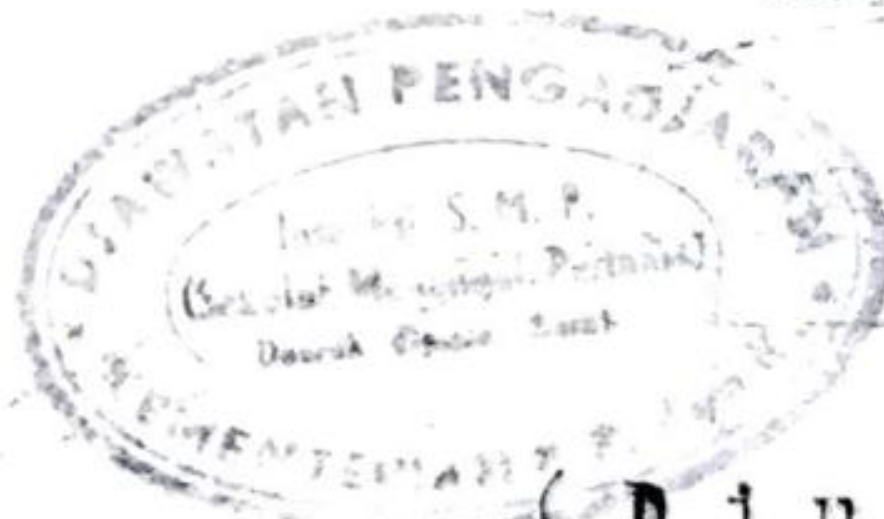
No. : 1510/E15/56
Hal : No.Registrasi sekolah2
Partikular, laporan2 dsh.-

- E D A R A N -

Dipermaklumkan, bahwa :

1. Sekolah Sdr., tertjatat dikantor Inspeksi SMP Djawa Barat, dengan no. 12/27/206, nomor mana masih berlaku untuk tahun pelajaran 1956/1957.
2. Setiap sekolah jang tertjatat, hendaklah mengirimkan laporan setiap bulan tentang murid, guru, pelajaran dsh. ke kantor Insp. SMP Djawa Barat dan ke Insp. SMP Pusat (seperti jang sudah biasa dilakukan).
3. Djika terpaksa, pengiriman laporan2, kami tunggu selambat-lambatnja sampai penghabisan bulan berikutnya.
4. Blanko laporan dapat diambil/diminta ke/dikantor Inspeksi tersebut.
5. Sekolah2 jang tidak mengirimkan laporan2, akan ditiadakan (dihapus) dari daftar sekolah2 Partikular.-

Bandung, 24 Djuli 1956.-
A.n. Inspektur S.M.P.
Kepala Daerah Djawa Barat,
Inspektur,



(D j u h a e n i) . -